

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA MAKASSAR



OLEH

RAHMA

B111 11 032

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN JURU
PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMA

B111 11 032

Skripsi

Diajukan sebagai Tugas dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

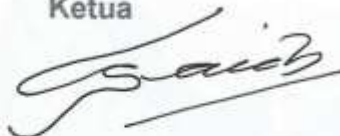
RAHMA

B 111 11 032

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 19 Mei 2015
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Rahma**

Nim : **B111 11 032**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI
KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

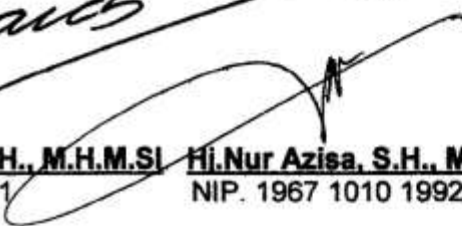
Makassar, April 2015

Disetujui oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.M.SI
NIP. 1962 0711 1987 031 001


Hi. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 1967 1010 1992 032 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RAHMA**

No. Pokok : B111 11 032

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir
Tidak Resmi di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. Amadi Miru, S.H., M.H.
1961071986011003

ABSTRAK

RAHMA (B11111032), TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA MAKASSAR di bawah bimbingan Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si sebagai Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa, S.H., M.H sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota makassar dan untuk mengetahui peranan penegak hukum dan pihak terkait dalam menindak juru parkir tidak resmi di kota makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar dan yang menjadi objek penelitian adalah pihak kepolisian, juru parkir di kota makassar, serta perusahaan daerah parkir makassar raya selaku pihak yang mengelola perparkiran. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung, pengambilan data, serta membagikan kousioner dengan pihak yang bersangkutan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota makassar yaitu: 1). Faktor ekonomi 2). Faktor lingkungan, 3). Faktor pendidikan, dan 4). Faktor kurangnya lapangan pekerjaan. Adapun upaya peranan penegak hukum dan pihak terkait dalam menindak juru parkir tidak resmi di kota makassar yaitu 1). Melakukan patroli, 2) memberikan peringatan, 3) Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi, dan 4) mengusir secara paksa jika peringatan tidak ditaati.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar**” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Shalawat serta salam tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan rendah hati penulis menghatur penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya teristimewa, teriring doa dan kasih sayang yang tiada henti atas segala cinta yang tiada berujung, serta pengorbanan sampai saat ini, untuk kedua orang tua Ayahanda tercinta **Syarifuddin Hadi** dan ibunda tercinta **Muliati Palla**. Semoga sedikit buah karya ini bisa melahirkan seulas senyum bangga di hati.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **bapak Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si** selaku pembimbing I dan **ibu Hj. Nur Azisa S.H., M.H** selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, bapak dan ibu senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis temui, mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian akhir skripsi ini. Namun, Alhamdulillah berkat usaha dan kerja keras serta bimbingan, arahan, kerjasama, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Prof.Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu** Selaku Rektor Unhas;
2. Ibu **Prof.Dr. Farida Patittingi S.H., M.H** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof.Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H** Sebagai Wakil Dekan I,
Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H** Sebagai Wakil Dekan II,
Bapak **Dr. Hamzah Halim S.H., M.H** Sebagai Wakil Dekan Iii Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof.Dr. Andi Sofyan S.H., M.H, H.M. Imran Arief, S.H., M.S,**
dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku dosen dan penguji yang

telah banyak memberikan masukan dan kritikan demi menyempurnakan skripsi ini.

5. **Bapak prof muhadar**, selaku ketua bagian hukum pidana yang telah banyak memberikan pengetahuan, mengayomi dan memberikan teladan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh staf dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, membantu dalam proses administrasi, serta proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Bapak **Burhan, S.Sos, S.H, M.H**, dan Bapak **Putra S.H** selaku pihak kepolisian yang telah membantu dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
9. Bapak **Drs. Aryanto Dammar, MM, Azhar**, dan **Kak Anna** selaku Staf Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
10. **Kak Andi, Edho, Arif Rate, Abdul Halim, Imam Ahmad** selaku juru parkir yang telah memberikan informasi.
11. Buat semua keluarga terima kasih atas doa serta kasih sayang yang diberikan selama ini.
12. Teman-teman **Mediasi Angkatan 2011**, yang telah berbagi suka dan duka sejak penulis menuntut ilmu di kampus ini, terima kasih atas

kebersamaan, bantuan, semangat dan doanya serta kebersamaan selama ini, semoga selalu terjalin rasa persaudaraan diantara kita semua.

13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan **Windyani Umar, Dewi Sartika Tenriajeng, Dian Cahyasari S.H, Hj.Athifa Ramadhani S.H, Rian Pratama S.H, Samir S.H, Dewa Hadi Khalfihim, Iin S.H Uccang S.H, Ayu Ningsih, Yunus S.H, Rima, Iis Ariska, sriyani Isra, Indo Padang, Ainil Ma'sura, Lestari Sainuddin S.H, Andi Tenri Walinonong S.H, Ilham Prawira S.H**, kalian semua telah menguatkan penulis untuk tetap berdiri tegak dalam menghadapi semua masalah yang ada dalam kehidupan ini, terima kasih buat kalian telah memberi warna dalam kehidupan penulis yang selalu berbagi disaat senang maupun susah.
14. Keluarga besar **Unit Karate Club (UKC) Universitas Hasanuddin**.
15. Teman-teman Seperjuangan selama melakukan penelitian, **Kak Hasnah Mahmud S.P, Ayu Ningsih, Irma Yulianti, Trie S.H , Indo dan Padang**.
16. Keluarga besar **Pondok Nurul Esky, Tante Sida, Irma M, Sity Hi Aras, Tati, Irma Yulianti, Indah, Kak Dani, Tari, Kak Tira, Ayu, Ria, Kak Tini, Ayu Lestari, Dan Ulfah** yang selama ini berbagi suka maupun duka.
17. Buat teman-teman seperjuangan kkn posko, **Jusri, Fandy, Drg. Eva Sari Budi Hartono, Hariyati, Fitrah, Dan Nila Chandra**.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Teriring doa penulis panjatkan kepada Allah SWT kiranya semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya dalam bentuk apapun, dilimpahkan anugerah, berkat, rahmat dan ridho-Nya, Aamiin.

Makassar, 29 April 2015

RAHMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	6
1. Pengertian Kriminologi	6
2. Pembagian Kriminologi	8
3. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi	10
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Pengertian Pelanggaran	20
C. Parkir	22
1. Pengertian Parkir.....	22
2. Pengertian Juru Parkir	25
3. Juru Parkir Tidak Resmi	30
4. Pengelolaan Parkir	31
D. Ketentuan Pidana	34
E. Teori Penyebab Kejahatan	35
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	48
B. Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan juru parkir tidak	
--	--

resmi di kota makassar.....	51
B. Peranan penegak hukum dan pihak berwajib dalam menangani ju parkir tidak resmi di kota makassar.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar juru parkir di kota Makassar.....	53
Tabel 2 Data responden juru parkir.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Terkait dengan peraturan, Undang-undang lalu lintas terbaru menerapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat buat pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya.

Terkait keberadaan kendaraan bermotor dan mobil maka keberadaan juru parkir di setiap tempat semakin kian bertambah. Juru parkir terbagi 2 (dua) yaitu:

- Juru parkir resmi
- Juru parkir liar/tidak resmi

Kota Makassar adalah salah satu wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dan menempati peringkat kelima wilayah terbesar dan terramai di Indonesia serta pendapatan perkapita penduduknya semakin tinggi. Disamping itu juga berpotensi sebagai daerah transit yang strategis di wilayah Indonesia Timur sebagai kota bisnis dan perdagangan. Selain itu, Makassar juga terkenal sebagai salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur. Maka dari itu, banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di kota Makassar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, akibat dari keramaian itu lalu lintas di kota ini sangat macet sehingga tidak heran kalau kita akan menemukan kemacetan. Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana public, apalagi maraknya keberadaan juru parkir liar yang menggunakan badan jalan sebagai bisnis basah membuat kota ini semakin sempit dan penataannya tidak teratur, hal tersebut menambah kemacetan di kota Makassar.¹

Untuk mencegah terjadinya kemacetan, pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Tujuannya adalah untuk memfokuskan perhatian pada sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut serta pemanfaatan ruang dan interaksi guna mencapai kehidupan

¹ www.kemacetan.kotaMakassar.blogspot.com/2012/01/kemacetan-di-kota-makassar.htm, diakses pada tanggal 25 november 2014, pukul 19.00 WITA

yang efisien dan nyaman sehingga pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Kota Makassar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan.

Salah satu permasalahan pokok pada transportasi adalah masalah parkir. Pada setiap kegiatan yang membangkitkan arus lalu lintas (fasilitas umum seperti supermarket, mall, kantor, hotel dll) selalu butuh ruang bebas untuk parkir kendaraan. Pada kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir. Di kota Makassar kendaraan diasanya diparkir di badan jalan (on street parking) dan diluar badan jalan (off street parking). Terkadang juru parkir juga memanfaatkan jalur pedestrian sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini. ²

Hilangnya kendaraan ataupun barang-barang pengguna parkir tidak resmi akan menjadi kerugian sendiri karena tidak adanya jaminan dari pihak parkir tidak resmi. Selain itu, juga akan merugikan ketertiban dan kepentingan umum serta tata kota.

Dalam pengaturan pemarkiran, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang

² Robinson Tarigan. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara. hal 26

sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Perusahaan ini juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatasnamakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi. Diharapkan bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di kota Makassar yang semakin meningkat dan mengganggu kepentingan umum. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak adalagi parkir tidak resmi.

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota Makassar ?
2. Bagaimana peranan penegak hukum dan pihak terkait dalam menangani juru parkir tidak resmi di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peranan penegak hukum dan pihak terkait dalam menindak juru parkir tidak resmi di kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau perbandingan bagi mereka yang berminat meneliti topik pembahasan yang berkaitan dengan keberadaan juru parkir tidak resmi di kota Makassar.
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan kita sebagai sarjana hukum yang berintegritas tinggi dalam menjunjung keadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi lahir pada pertengahan abad ke 19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan **Cesare Lambroso** (1873) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan **Enrico Ferri** sebagai contoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pada pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh **P.Topinard** (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

³ H. Romli Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. hal. 1

⁴ Topo Santoso Dkk. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 9

Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (Hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian di atas jelas keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut sangat dekat karena secara praktis, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyelidikan atas terjadinya suatu kejahatan.⁵

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi sebagai berikut: ⁶

1. Edwin H. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.

Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

2. MWE. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

3. W.A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

4. J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

⁵H. Romli Atmasasmita. *op.cit.* hal 5

⁶ A.S. Alam. 2010. Pengantar kriminologi. Makassar: Refleksi. hal 1

5. Sutherland

Merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum, disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. *Etiologi* kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. *Penology*

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.⁷

1) Antropologi kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

2) Sosiologi kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

3) Psikologi kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

4) Psikologi dan *neuro phatologi* kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

5) *Penology*

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa

⁷ Topo Santoso dkk, *Op.cit* ,Hal 4

kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari ilmu kriminologi praktis ini adalah:⁸

a. *Hygiene criminal*

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor terjadinya kejahatan.

b. Politik kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta tidak berniat untuk melakukan kejahatan lagi.

c. Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

3. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Aliran-aliran atau sering dikenal sebagai *schools* dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya.

Dalam ilmu kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan gejala kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁹

a. Kriminologi Klasik

Dalam hal ini, gambaran tentang kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, kejahatan diartikan

⁸ A.S. Alam. *op.cit.* hal. 4

⁹ Dikdik M. Arief Mansur Dkk. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal 71

sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Orang melakukan kejahatan sebagai pilihan bebas masing-masing individu dengan menilai untung ruginya. Untuk mencegah agar orang yang tidak melakukan kejahatan, kerugian atau resiko yang harus ditanggung oleh pelaku harus ditingkatkan (misalnya dengan ancaman sanksi yang berat atau tinggi).

Dengan demikian, pertimbangan antara kerugian atau resiko dengan keuntungan atau kenikmatan yang akan diperoleh dari kejahatan akan lebih besar pada resikonya. Dalam hal menguji sistem hukumnya akan meminimalkan kejahatan.

b. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologis maupun kultural. Dengan demikian, manusia tidak bebas untuk menentukan perbuatannya karena dibatasi dan ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis ini mengarahkan fokusnya pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatannya melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri pelaku dari aspek fisik, sosial, dan kultural.

c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang setelah tahun 1960-an sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling.

Aliran ini tidak mempersoalkan apakah perilaku manusia itu bebas atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang terjadi.

Dengan demikian, aliran ini mempelajari proses-proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan atau pendefinisian kejahatan pada perbuatan-perbuatan tertentu, pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran

1. Pengertian Tindak Pidana ¹⁰

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

¹⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan PUKAT-Indonesia.hal.18

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

1. ***Strafbaar feit*** adalah peristiwa pidana;
2. ***Strafbare handlung*** diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. ***Criminal act*** diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:

- ***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum,
- ***Baar*** diartikan sebagai dapat dan boleh,
- ***Feit*** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku-tingkah laku mereka itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan

siapa di antara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu.¹¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam pembahasan hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :¹²

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana dan pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkrit, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

¹¹ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 71

¹² *Ibid*, hal 28

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dengan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *woordurende delicten*. Tindak pidana juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (Pada

kejahatan jabatan) atau nahkoda (Pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.¹³

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu

¹³Amir Ilyas. *op.cit.* hal. 32

pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan dan meringankan secara tegas dalam rumusan.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Pengertian pelanggaran ¹⁴

Pengertian pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti pertubrukan, pertumpukan, serang-menyerang, dan bertentangan, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *memorie van toelichting* (pada *wetboek van strafrecht* di negeri belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat suatu perbuatan merupakan delik hukum bila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat. Terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

¹⁴ Sumidjo. 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV.Armic. hal.86

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu :¹⁵

- a) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama;
- b) Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; dan
- c) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adalah :¹⁶

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana;
- b) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :¹⁷

¹⁵ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.

¹⁶ Fadli sandi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Izin Mengemudi Dikota Makassar*. 2012. hal 15

1. Pidana penjara hanya dicantumkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dengan kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

C. Parkir

1. Pengertian parkir

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengertian parkir adalah keadaan kendaraan

¹⁷ Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Renika Cipta. hal. 81

berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁸

Undang-undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 43 yang membahas mengenai fasilitas parkir sebagai berikut:

Pasal 43

Ayat (1) penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

Ayat (2) penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. Usaha khusus perparkiran; atau
- b. Penunjang usaha pokok.

Ayat (3) fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalandesa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang

¹⁸ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Surabaya: Kesindo Utama. hal 4.

melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa oleh karena itu peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.

Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar :¹⁹

Pasal 1 angka 6

“Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan”.

Pasal 1 angka 8

“Tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir”.

Pasal 1 angka 9

“Tarif jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh direksi”.

Pasal 1 angka 10

“Pemakaian tempat parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak mamakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah”.

Pasal 10

Penggunaan tempat parkir dan juru parkir diwajibkan:

- a) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;

¹⁹ Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

- b) Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c) Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d) Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e) Juru parkir wajib menggunakan seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi.

Sedangkan dalam Perda kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:²⁰

Pasal 3

- (a) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah;
- (b) Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- (c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar.

Pasal 4 angka 1

- (1) Pengenaan pajak didasarkan pada jumlah (tarif) pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh setiap pemakai jasa tempat parkir;
- (2) Tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan oleh penyelenggara usaha perparkiran dan berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengajuan tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan sekurang-kurangnya untuk roda dua Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk roda empat sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Pengertian Juru Parkir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, juru parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur mobil yang parkir.²¹ Secara definitif, daerah yang

²⁰ Perda Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir

merupakan larangan parkir adalah sepanjang enam meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang sudah ditentukan sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam, sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan, sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan, sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah pelintasan sebidang, sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.²²

Juru parkir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: ²³

- **Juru Parkir Resmi**

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar di ceklis kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan di kolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa Id.card, rompi dan karcis parkir

Juru parkir resmi memiliki sebuah organisasi dimana juru parkir resmi berada dibawah kendali Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Pihak-pihak yang berhubungan langsung dilapangan atau lokasi perparkiran bekerja sama dengan seorang kolektor. Kolektor adalah orang yang memiliki tugas untuk menasih ke juru parkir yang dianggap resmi. Setiap wilayah berbeda kolektornya. Kolektor

²¹ Aplikasi Kamus besar bahasa Indonesia. offline.

²² Kompasiana.com/post/read/52889/2/tata-kelola-parkir-kota-makassar-perlu-di-benahi.html, diakses pada tanggal 20 november 2014, pukul 22:06 WITA

²³ repository.unhas.ac.id. diakses pada tanggal 18 november 2014. pukul 19:01 WITA

hanya mengambil setoran ke juru parkir lalu menandai catatannya jika juru parkir sudah menyetor. Hasil yang di dapat oleh kolektor akan di setor ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Sebelum resmi menjadi juru parkir mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah di buat oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon juru parkir sebagai berikut:

- a. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Sehat jasmani dan rohani dan standar umur 17 tahun sampai masih mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik
- c. Bersedia memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir setiap melakukan pemungutan dan memberikan pelayanan dengan baik serta tidak bersifat arogansi kepada pengguna jasa parkir.
- d. Bersedia melaksanakan tugas perparkiran tidak akan memarkir kendaraan diatas trotoar atau melampaui garis marka parkir.
- e. Bersedia tidak akan melakukan kegiatan lain selain perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin dari Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- f. Bersedia tidak akan meninggalkan lokasi parkir dan tidak menyerahkan rompi dan Id. Card ke orang lain tanpa

persetujuan dari pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

- g. Bersedia mematuhi target setoran setiap hari yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Adapun klasifikasi dan pemakaian tempat parkir sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota makassar.

Pasal 7

Ketentuan jenis pungutan, tarif dan klasifikasi pemakaian tempat parkir dimaksud pasal 5, serta tata cara penagihannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 8

- (1) Juru parkir dan pengguna tempat parkir wajib memenuhi ketentuan pasal 7;
- (2) Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru parkir dan atau pengguna tempat parkir tidak memenuhi ketentuan pasal 7.

Tidak seluruh tempat yang parkirannya dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir liar/tidak resmi yang mengumpulkan seluruh pendapatannya kedalam kantong sendiri. Untuk tempat parkir yang luas kadang-kadang pengaturan parkir dilakukan oleh beberapa orang yang dikelola oleh seorang jagoan daerah yang bersangkutan.

• **Juru Parkir Liar/Tidak Resmi**

Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya

bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Juru parker tidak resmi adalah julukan bagi mereka yang bertindak sebagai juru parkir di sebuah tempat perparkiran kendaraan bermotor. Mereka ini bukan petugas juru parkir resmi dari Peraturan daerah Parkir Makassar Raya, mereka bertindak sendiri menjadi juru parkir. Otomatis, segala pendapatan dari hasil parkir diambil sendiri. Tidak masuk ke kas daerah melalui Peraturan daerah Parkir Makassar raya. Hasil penelusuran BKN di sejumlah tempat parkir yang cukup ramai di kota Makassar, terungkap, mereka yang bertindak sebagai juru parkir ternyata tidak memiliki ikatan kerja dengan Peraturan daerah Parkir.

Juru parker tidak resmi tersebut bertindak sendiri sebagai juru parkir. Mereka hanya memanfaatkan peluang adanya lahan parkir yang kosong dan tidak memiliki juru parkir resmi, seperti yang kita lihat saat ini juru parkir tidak resmi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak yang masih dibawah umur juga berperan sebagai juru parkir tidak resmi, dengan alasan bisa mendapatkan uang dengan mudah sebagai juru parker tidak resmi, keuntungannya pun bervariasi mulai 50 ribu sampai 100 ribu perharinya. di tempat itulah mereka menarik tarif parkir.

Adapun sejumlah tempat yang cukup ramai di kota Makassar yang menjadi lahan bagi para jukir liar yakni di tempat-tempat

perbelanjaan, seperti didepan Mall Panakukang, Mall Ratu Indah, Pasar Senggol, Pasar Terong dan lainnya, di tempat-tempat itu, dimanfaatkan para juru parkir tidak resmi ini dengan menarik retribusi liar sesuka hatinya. Tarif parkir yang mereka pasang antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kendaraan.

Adapun dua cara yang umum digunakan untuk mengumpulkan pendapatan yaitu:

1. Berdasarkan persentase karcis yang terpakai, masalahnya yang sering ditemukan adalah juru parkir tidak memberikan karcis, bahkan pura-pura lupa memberikan karcis sehingga pendapatan tidak masuk ke kas daerah.
2. Borongan untuk satu kawasan.

3. Juru Parkir Tidak Resmi

Dalam pelaksanaan perparkiran yang dilakukan oleh juru parkir, terkadang ditemukan juru parkir tidak resmi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam:

- a) Perda kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar:

Sebagaimana telah di jelaskan dalam perda kota Makassar :

Pasal 9

- (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
- (2) Dilarang mengotori/merusak tempat parkir;

- (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat Izin Direksi.

Pasal 10

Penggunaan tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati kewajiban jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir.

- b) Perda kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak

Parkir:

Pasal 4 angka 3

pengajuan tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan sekurang-kurangnya untuk roda dua Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk roda empat sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pengelolaan Parkir ²⁴

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir

²⁴ Website : <http://id.wikipedia.org/wiki/parkir> diakses pada tanggal 10 november 2014, pukul 09:37 WITA

untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang disahkan.

Parkir di pinggir jalan merupakan kegiatan parkir yang dilakukan ditepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir biasanya dilakukan secara parkir paralel atau parkir serong, bila dinyatakan demikian dengan rambu dan marka. Parkir di pinggir jalan biasanya penting untuk kegiatan bisnis yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko 24 jam, kantor kecil, atau kegiatan lainnya yang ada di pusat kota.

Selanjutnya dalam pengelolaan perparkiran terdapat tiga cara parkir, berdasarkan susunan kendaraan yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong. Ini adalah konfigurasi dimana pengemudi kendaraan dapat mengakses parkir secara mandiri. Adapun mengenai ketiga cara parkir tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

a. Parkir paralel

Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan.

b. Parkir tegak lurus

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis

²⁵Dian eko prakoso. Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar (suatu tinjauan sosiologi hukum). 2013. hal 38

mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

c. Parkir serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun dipelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya.

Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah Tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian

parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam minindak para pelanggar kabijakan parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah diatur mengenai klasifikasi, pemakaian tempat parkir, serta larangan dan kewajibannya yaitu :²⁶

1. Pasal 6 mengenai klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan lalu lintas kendaraan.
2. Pasal 9 mengenai;
 - (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya diluar tempat parkir yang ditetapkan;
 - (2) Dilarang mengotori/merusak tempat parkir;
 - (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

D. Ketentuan Pidana

Mengenai ketentuan pidana di atur dalam Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar Pasal 13 yaitu :²⁷

- a. Pelanggaran pasal 9 dan 10 peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah;
- c. Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pelanggaran atas peraturan daerah ini dijatuhkan sanksi

²⁶ Perda Kota Makasssar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. hal.6

²⁷ Perda Kota Makasssar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Op.Cit. hal.8

administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangan dunia kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan.

Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:²⁸

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih manayang baik dan mana yang buruk. Perbuatan yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Merurut Beccaria bahwa :

“setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*”.

²⁸ weda, made darma. 1996. Kriminologi. Jakarta: Raja grafindo. Hal 15-20

Berdasarkan pendapat beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan meskipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

2. Teori Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda bahwa:

“teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum”.

Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut:

- a. adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kita harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usai dal lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memiliki antara yang benar dan salah.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Darma Weda bahwa :²⁹

²⁹ ibid,.hal 16

“dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri”.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Pada tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi, dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang enam teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keenam aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keenam teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso, menurut Lombroso bahwa:

“kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*)”.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa :

“ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya”.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh lombroso yaitu:

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

2) Teori Mental Tester

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard bahwa:

“setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3) Teori Psikiatik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi bahwa:³⁰

“teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral *insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan, pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial”.

4) Teori Sosiologis

³⁰ Weda. Made Dharma. Op.cit. hal 19

Dalam memberikan kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dari ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

5) Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis, Menurut Tarde adalah:

“teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi”.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan, Menurut Tarde bahwa:³¹

“orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”.

Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

³¹ *ibid.* hal 20

6) Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D.Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda, bahwa:³²

“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras, keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”³³

³² Weda, Made Darma. *Op.cit.* hal 20

³³ Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru). Jakarta: Kencana. hal 4

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, dengan Kongres PBB pun menekankan, bahwa "*the over all organization of society should be considered as anti criminogenic*" dan menegaskan bahwa "community relations were the basis for crime prevention programmes" oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "extra legal system" atau "*informal system*" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat.

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kebijakan strategi integral di Republik Czech.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, sesuai peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai ("*older philosophy of crime control*") dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang

mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.³⁴

Memang sejarah hukum pidana menurut m. Cherif bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaharuan pidana di eropa kontinental dan di inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.

Atas dasar pandangan yang demikian pulalah kiranya, ada pendapat bahwa teori retributive atau teori pembalasan dalam hal ppidanaan merupakan "*a relic of barbarism*". Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dikenakan pidana.

Karena seseorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlakukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Pandangan

³⁴ Muladi Dkk. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung:.. Alumni. hal 149

determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokohnya antara lain Lombroso, Garofalo Dan Fern.

Sebagaimana yang dikemukakan a.s alam bahwa penanggulangan kejahatan empiris terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:³⁵

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota

³⁵ A.S Alam. Op.Cit. hal 79-80

besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri kendaraan roda dua tetapi kesempatan itu dihilangkan karena kendaraan roda dua yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya pencegahan kejahatan berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh

kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan bagi pemerintahan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁶

³⁶ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hal 114

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar. Adapun lokasi penelitian yaitu, Polrestabes kota Makassar, juru parkir di kota makassar, perusahaan daerah parkir makassar raya, dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah.

Pemilih memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan skripsi, utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data-data yang berhubungan faktor terjadinya keberadaan juru parkir tidak resmi di kota Makassar dan upaya penanggulangannya.

B. Jenis penelitian Dan Sumber Data

Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasional. Penelitian observasional adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi, baik pada fenomena natural maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, dan tidak dapat dikendalikan oleh sipeneliti misalnya perubahan perilaku masyarakat, kriminalitas, dan sebagainya.³⁷

Adapun sumber data dalam penelitian adalah:

³⁷ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 11

1. Data primer

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual. Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus dijadikan sebagai sumber data primer. Data primer mempunyai keuntungan karena sesuai dengan tujuan penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan dikontrol oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian, dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan pihak kepolisian, juru parkir di kota makassar, perusahaan daerah parkir makassar raya dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah.³⁸

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel, dokumen, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁸ Ulber silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. hal 62

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya-jawab kepada narasumber atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini sehingga diperoleh data yang diperlukan.

b. Studi pustaka

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Analisis data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji dan membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal-hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar

Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan faktor yang mempengaruhi munculnya keberadaan juru parkir tidak resmi di kota makassar dan hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian. Akan tetapi, sebelum penulis menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberadaan juru parkir tidak resmi di kota Makassar, penulis terlebih dahulu akan menguraikan atau menceritakan kronologi yang terjadi, dimana penulis memperoleh data dari hasil wawancara selama melakukan penelitian.

Kota Makassar adalah kota berkembang yang tingkat pembangunannya terus meningkat. Hal ini menyebabkan kota Makassar semakin padat oleh banyaknya tempat-tempat seperti gedung, toko, pasar, dan perkantoran, demi memenuhi kebutuhan masyarakat kota Makassar yang semakin meningkat. Dengan adanya tempat-tempat yang semakin banyak, sehingga menyebabkan lahan parkir yang semakin berkurang.

Pusat keramaian menjadi lokasi juru parkir tidak resmi untuk menjalankan usahanya sehingga memanfaatkan tempat parkir seperti tepi jalan umum, pembangunan gedung-gedung berlokasi di tepi jalan raya yang digunakan untuk kegiatan publik berupa kantor, sekolah, toko,

swalayan, ruko, hotel, restoran, rumah-rumah makan, dll, yang diijinkan dibangun sekalipun tidak dilengkapi analisa dampak lalu lintas atau tidak memiliki lahan parkir. Lokasi perkantoran swasta maupun pemerintah menjadi titik macet setiap hari. Lantaran pegawai dan karyawannya menggunakan lahan jalan sekitar kantor untuk memarkir kendaraan.

Hal tersebut mendorong lahirnya keberadaan juru parkir tidak resmi di kota Makassar, seperti yang kita ketahui bahwa juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar di ceklis koordinator Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan memiliki izin untuk melakukan usaha Perparkiran dan telah melakukan pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, sedangkan juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang namanya tidak terdaftar di perusahaan daerah parkir makassar raya dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perparkiran.

Jika dilihat keberadaannya, banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat juru parkir tidak resmi melakukan usaha perparkiran, hal tersebut terjadi karena ada pihak-pihak yang menggunakan atribut perusahaan daerah parkir makassar raya akan tetapi mereka tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi di perusahaan daerah parkir makassar raya, hal inilah yang menjadi ketidaktahuan dari masyarakat pengguna tempat parkir mengenai juru parkir tidak resmi yang menggunakan atribut perusahaan daerah parkir sehingga sering terjadi

tindakan ilegal oleh juru parkir tersebut dengan memungut retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi.

Tabel 1
Data Juru Parkir Di Kota Makassar

Wilayah	Jalan	Resmi		Tidak Resmi	
		Jumlah Titik	Juru Parkir	Lokasi Titik	Juru Parkir
II	-JL. Ujung Pandang	13	21	2	2
	-JL. R.A. Kartini	2	2	1	1
III	-JL. Bau Maseppe	1	1	1	1
VI	-JL. Sungai Saddang	3	4	1	1
VII	-JL. Ahmad Yani	16	20	1	1
VIII	-JL. Jend. Sudirman	3	4	4	4
IX	-JL. Andalas	12	21	2	2
	-JL. Tentara Pelajar	12	13	3	3
X	-JL. Mesjid Raya	3	4	2	2
	-JL. Sunu	4	5	1	1
XI	-JL. Emmy Saelan	2	2	2	2
	-JL. SLT Alauddin	7	10	2	2
XII	-JL. Rappocini Raya	6	6	4	4
XIV	-JL. Urip Sumoharjo	6	7	5	5
XVII	-Pasar Butung	19	19	4	4
	-Pasar Terong	10	10	1	1

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, terdapat 1352 juru parkir resmi yang tersebar pada 989 titik, perusahaan daerah parkir makassar raya membagi 989 titik

tersebut kedalam 18 wilayah di kota makassar pada tahun 2014. Pada penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik sampel dimana terdapat beberapa jalan dalam suatu wilayah tertentu yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian yang menjadi tempat juru parkir melakukan usaha perparkiran, Dalam satu wilayah penulis hanya menggunakan beberapa jalan sebagai sampel untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini, dimana hasil penelitian di jalan-jalan tersebut dianggap telah mewakili seluruh area dalam 1 wilayah Misalnya wilayah II tepatnya JL. Ujung Pandang, terdapat 21 juru parkir yang tersebar di 13 titik secara resmi dan terdapat 2 juru parkir yang tersebar di 2 titik secara tidak resmi dan JL. R.A Kartini, terdapat 2 juru parkir yang tersebar di 2 titik secara resmi dan terdapat 1 juru parkir tidak resmi yang tersebar di 1 titik. Untuk wilayah yang menjadi lokasi penelitian yaitu wilayah II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, dan XVII.

Tabel 2

Data Responden Juru Parkir

N o	Nama	Umur	Alamat	Lokasi	Jalan	Peng hasila n (Rp)	Lama Bekerj a
1	Andi	27 Tahun	Jl. Balang Baru 2 No. 2	Depan Bank Mutiara	JL. Ahmad yani	100.0 00	12 Tahun
2	Abdul Halim	42 Tahun	Antang	Panakukk ang Mas	JL. Pengay oman	150.0 00	20 Tahun
3	Ilham	26 Tahun	Jl. Toddopuli 10	Depan Mall Panakuk	JL. Pengay oman	200.0 00	13 Tahun

				ang			
4	Ahmad M	29 Tahun	Arif Rate	RS Chaterine Booth	JL. Arif Rate	130.000	13 Tahun
5	Imam Ahmad	32 Tahun	Ratulangi	Sentral	JL. Cokroaminoto	300.000	20 Tahun
6	Edho	33 Tahun	JL. Perintis Kemerdekaan No.3	Ayam Penyet Ibu Ruth	Jl. Pengayoman	250.000	4 Tahun
7	Sukarman	27 Tahun	Jl. Sungai Saddang	Pasar Butung	JL. Butung	200.000	15 Tahun
8	Fajar Fajrin	22 Tahun	Hartako Jaya	Depan indomaret	JL. Urip Sumoharjo	180.000	7 Tahun
9	Rusmin	32 Tahun	Jl. A.P. Pettarani	BKPM Provinsi Sul-Sel	JL. Bougenville	150.000	10 Tahun
10	Abidin	46 Tahun	JL. Rappo-Rappo	Bank Mandiri	Jl. Andalas	400.000	20 Tahun

Untuk menjawab beberapa pertanyaan, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada responden dan membagikan kusioner, adapun hasil penelitian yang penulis peroleh selama melakukan penelitian yaitu :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, beberapa dari juru parkir tidak resmi telah menggeluti pekerjaan sebagai juru parkir tidak resmi selama lebih dari 12 tahun, namun pada kenyataannya pihak pemerintah kota makassar khususnya perusahaan daerah parkir makassar raya tidak menindak lanjuti kasus tersebut, yang mengakibatkan juru parkir tidak resmi menggunakan tempat-tempat larangan parkir.

2. Juru parkir tidak resmi di kota Makassar kebanyakan tidak mendaftar langsung kepada perusahaan daerah parkir makassar raya, tetapi meminta izin kepada pihak perusahaan atau pemilik toko tanpa harus membayar.
3. Setoran dari juru parkir resmi setiap harinya dilihat dari luasnya tempat yang diberikan, misalnya yang bekerja di bank setoran setiap harinya Rp. 25.000, dan pasar Rp. 50.000, dari hal tersebut muncul keinginan juru parkir yang dulunya terdaftar di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, berpindah profesi sebagai juru parkir tidak resmi dengan alasan semua pendapatan yang di dapat setiap harinya menjadi miliknya sendiri tanpa distor ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
4. Dari hasil penelitian juga telah membuktikan bahwa pihak kepolisian tidak terlalu fokus dalam menindak juru parkir tidak resmi karena dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian, bahwa tindakan yang dilakukan apabila mendapati juru parkir tidak resmi adalah mengusir juru parkir tidak resmi apabila ada yang didapati melakukan usaha perparkiran di badan jalan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir tidak resmi di kota Makassar, baik itu pengaruh dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya lapangan pekerjaan.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sejauh ini merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai juru parkir tidak resmi. Mereka beralasan bahwa pemasukan setiap harinya lebih banyak tanpa harus dibagi ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, meskipun hal itu melanggar aturan. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, hampir semua juru parkir yang dijadikan sebagai objek penelitian mengindikasikan hal tersebut.

Selain alasan tersebut diatas, keharusan untuk menghidupi keluarga juga berpengaruh terhadap juru parkir yang tidak resmi. Hal ini terutama sangat berpengaruh terhadap juru parkir yang memiliki lokasi yang sempit dan relatif sepi, serta memiliki pendapatan yang juga relative kecil. Sebagai contoh salah seorang juru parkir tidak resmi yang penulis wawancarai di jalan ahmad yani, mengatakan bahwa sebelum menjadi juru parkir tidak resmi, mereka adalah juru parkir resmi yang namanya terdaftar di perusahaan daerah parkir Makassar raya. Namun karena tempat yang diberikan sempit dan sepi, berdampak pada pemasukan perhari yang mereka terima juga sangat Minim. Setoran yang diharuskan dari perusahaan daerah parkir Makassar raya adalah Rp. 25.000 per hari, sedangkan total penghasilan yang didapat setiap harinya hanya berkisar Rp. 50.000. sehingga dari penghasilan yang minim tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa tidak melakukan

penyetoran harian dan berpindah tempat dari jl. abdesir ke jl. ahmad yani.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa juru parkir tidak resmi yang mengatakan bahwa penghasilan yang didapat setiap hari lebih banyak dibanding pada saat menjadi juru parkir resmi. Selain itu, juga adanya peluang secara ekonomi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih mudah dan memadai dibanding pekerjaan lain misalnya menjadi tukang becak, dan tukang bentor. Mereka mengatakan bahwa Menjadi juru parkir tidak resmi hanya membutuhkan modal yang sedikit dibanding tukang bentor dan tukang ojek, juru parkir tidak resmi hanya bermodalkan sempritan dan lokasi untuk tempat parkir, sedangkan menjadi seorang tukang ojek dan tukang bentor membutuhkan modal yang banyak karena harus mempunyai motor untuk menjalankan usahanya.

2. Faktor lingkungan

Lebih lanjut salah satu faktor penyebab mereka melakukan usaha perparkiran secara tidak resmi yaitu faktor lingkungan sosial, dimana faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap seseorang untuk melakukan usaha perparkiran secara tidak resmi.

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya, dimana terdapat keinginan-

keinginan yang besar yang melekat pada diri seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, khususnya sebagai juru parkir yang hanya mendapatkan penghasilan kecil yang tidak cukup untuk makan setiap harinya dan membiayai anak untuk sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu juru parkir tidak resmi di kota makassar (wawancara tanggal 04 Februari 2015), mengakui bahwa dengan berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi seperti juru parkir yang lain yang juga berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi, pendapatan yang mereka dapatkan pada saat menjadi juru parkir resmi adalah Rp.50.000 sampai dengan Rp.60.000 setiap harinya, sedangkan menjadi juru parkir tidak resmi pendapatan setiap harinya bisa mencapai Rp.200.000. Mereka mengatakan bahwa selain mereka, masih banyak juru parkir tidak resmi yang kenyataannya bisa mendapatkan uang yang lebih dibanding menjadi juru parkir resmi namun tidak ditindak lanjuti oleh perusahaan daerah parkir makassar raya, dari kenyataan yang terjadi mereka yang dulunya sebagai juru parkir resmi berpindah profesi sebagai juru parkir tidak resmi.

3. Faktor pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para juru parkir tidak resmi melakukan usaha perparkiran yang melanggar aturan. Hal ini juga didukung oleh

kurangnya pemahaman serta kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur 9 sampai dengan 10 tahun.

Dari hasil penelitian, penulis melakukan wawancara dengan anak yang berumur 9 tahun dan berprofesi sebagai juru parkir di salah satu perkantoran di kota makassar (wawancara pada tanggal 25 Februari 2015), mengatakan bahwa alasan mereka melakukan pekerjaan tersebut karena mereka tidak sekolah seperti teman-temannya yang lain, alasan lain yang mereka ungkapkan bahwa mereka ingin membantu orang tua untuk mencari uang. Namun jika dilihat lapangan pekerjaan pada sektor umum, yang dapat melakukannya hanyalah orang dewasa, dan jarang ada lapangan pekerjaan yang mempekerjakan anak-anak yang berumur 9 tahun. Dari kenyataan yang terjadi Terpaksa anak tersebut bekerja sebagai juru parkir, dengan alasan pekerjaan ini sangat mudah mereka hanya duduk di samping motor yang terparkir, Pada saat pemilik kendaraan datang mereka langsung meminta uang layaknya juru parkir resmi pada umumnya, penghasilan yang didapat setiap harinya pun cukup banyak, berkisar antara Rp.75.000 s/d 150.000.

4. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan

Karena kurangnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, dan lain-lainnya. Sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai timbulnya suatu pelanggaran dan kesadaran akan peraturan hukum, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi di kota makassar.

B. Peranan penegak hukum dan pihak berwajib dalam menangani juru parkir tidak resmi di kota makassar

Setelah menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya keberadaan juru parkir tidak resmi di kota makassar, maka penulis akan menguraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh aparat terkait dalam menangani juru parkir tidak resmi di kota makassar.

Dalam usaha untuk menangani pelanggaran juru parkir tidak resmi di kota makassar, dapat dilakukan dengan usaha tindakan preventif, tindakan preventif ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan yang terjadi, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah pelanggaran lebih baik daripada mendidik pelanggar menjadi lebih baik, sebab bukan hanya diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau

mencapai tujuan, dalam hal ini dapat digunakan pendekatan sistemik melalui upaya preventif.

Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan daerah parkir makassar raya dan pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan daerah parkir makassar raya:

1. Melakukan patroli

Setiap hari pihak perusahaan daerah parkir makassar raya harus melakukan patroli bersama dengan pihak kepolisian, bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sekretaris direktur umum perusahaan daerah parkir makassar raya (wawancara tanggal 03 maret 2015), mengatakan bahwa direktur turut serta dalam melakukan patroli bersama-sama dengan tujuan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Patroli ini penting untuk dilaksanakan mengingat keberadaan juru parkir tidak resmi semakin meningkat, sehingga dengan adanya patroli bersama pihak kepolisian dapat menanggulangi keberadaan juru parkir tidak resmi secara efektif.

2. Memberikan peringatan

Kebijakan perusahaan daerah parkir makassar raya kepada juru parkir tidak resmi dengan cara memberikan peringatan sampai 3 kali, apabila ada yang melebihi batas yang diberikan akan ditindaklanjuti, dari hasil wawancara dengan direktur perusahaan daerah parkir

makassar raya, mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada juru parkir tidak resmi yang diproses karena apabila juru parkir tidak resmi telah diberi peringatan 1 kali, juru parkir tersebut pindah ketempat lain, dan kebanyakan juru parkir tidak resmi yang telah diberi peringatan adalah tukang bentor, anak-anak, bahkan orang dewasa yang menganggur.

3. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi

Melihat upaya dari perusahaan daerah parkir makassar raya, adalah memberikan peringatan selama 3 kali, namun hal tersebut tidak efektif karena setelah mendapat peringatan 1 kali juru parkir tidak resmi tersebut berpindah ke tempat lain. Maka dari itu pihak perusahaan daerah parkir makassar raya melakukan inisiatif bahwa setelah ada juru parkir tidak resmi yang didapati menjalankan usahanya, pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya langsung membawa ke kantor, mensosialisasikan mengenai perparkiran, menjelaskan PERDA yang dilanggar, dan mengajak untuk menjadi juru parkir resmi.

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian, dari Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak kepolisian (wawancara tanggal 10 Februari 2015), bahwa apabila ditemukan juru parkir tidak resmi melakukan usaha perparkiran di tempat sebagai berikut:

- 1) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- 2) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 M.
- 3) Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- 4) Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- 5) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- 6) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- 7) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Apabila terdapat juru parkir yang melakukan usaha perparkiran di tempat tersebut, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi apabila ada juru parkir yang melakukan usaha selain yang menjadi tempat larangan parkir akan diusir sepanjang tidak menggunakan ke-7 tempat larangan parkir.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang namanya tidak terdaftar di perusahaan daerah parkir makassar raya dan tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan usaha perparkiran, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota makassar adalah :

- a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sejauh ini merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai juru parkir tidak resmi, keharusan untuk menghidupi keluarga juga berpengaruh terhadap juru parkir yang tidak resmi. Hal ini terutama sangat berpengaruh terhadap juru parkir yang memiliki lokasi yang sempit dan relatif sepi, serta memiliki pendapatan yang juga relative kecil. Sebagai contoh salah seorang juru parkir tidak resmi yang penulis wawancarai di jalan ahmad yani, mengatakan bahwa sebelum menjadi juru parkir tidak resmi, mereka adalah juru parkir resmi yang namanya terdaftar di perusahaan daerah parkir Makassar raya. Namun karena tempat yang diberikan sempit dan sepi, berdampak pada pemasukan perhari yang mereka terima juga sangat Minim. Setoran yang diharuskan dari perusahaan daerah parkir Makassar raya adalah Rp. 25.000 per hari, sedangkan total

penghasilan yang didapat setiap harinya hanya berkisar Rp. 30.000. sehingga dari penghasilan yang minim tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa tidak melakukan penyetoran harian dan berpindah tempat dari jl. abdesir ke jl. ahmad yani.

b. Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya, dimana terdapat keinginan-keinginan yang besar yang melekat pada diri seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, khususnya sebagai juru parkir yang hanya mendapatkan penghasilan kecil yang tidak cukup untuk makan setiap harinya dan membiayai anak untuk sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu juru parkir tidak resmi di kota makassar (wawancara tanggal 04 Februari 2015), mengakui bahwa dengan berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi seperti juru parkir yang lain yang juga berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi, pendapatan yang mereka dapatkan pada saat menjadi juru parkir resmi adalah Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000 setiap harinya, sedangkan menjadi juru parkir tidak resmi pendapatan setiap harinya bisa mencapai Rp.200.000.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para juru parkir tidak resmi melakukan usaha perparkiran yang melanggar aturan. Hal ini juga didukung oleh

kurangnya pemahaman serta kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur 9 sampai dengan 10 tahun.

d. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan

Karena kurangnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, dan lain-lainnya. Sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai timbulnya suatu pelanggaran dan kesadaran akan peraturan hukum, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi di kota Makassar.

2. Upaya penanggulangan pihak terkait

a. Melakukan patroli

Pihak perusahaan daerah bersama-sama pihak kepolisian melakukan patroli dengan tujuan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Patroli ini penting untuk dilaksanakan mengingat keberadaan juru parkir tidak resmi semakin meningkat, sehingga dengan adanya patroli bersama pihak kepolisian dapat menanggulangi keberadaan juru parkir tidak resmi secara efektif.

b. Memberikan peringatan

Kebijakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada juru parkir tidak resmi dengan cara memberikan peringatan

sampai 3 kali, apabila ada yang melebihi batas yang diberikan akan ditindaklanjuti.

c. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi

Pihak perusahaan daerah parkir makassar raya memberikan peringatan selama 3 kali, namun hal tersebut tidak efektif, Maka dari itu pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya melakukan inisiatif bahwa setelah ada juru parkir tidak resmi yang didapati menjalankan usahanya, pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya langsung mensosialisasikan mengenai perparkiran, menjelaskan peraturan-peraturan yang dilanggar, dan mengajak untuk menjadi juru parkir resmi.

d. Pihak kepolisian akan menindak lanjuti juru parkir yang menggunakan ke-7 tempat larangan parkir, tetapi jika juru parkir tidak menggunakan tempat larangan parkir tersebut sebagai tempat dalam melakukan usaha perparkiran akan diusir sepanjang tidak melanggar peraturan.

B. SARAN

1. Pengelolaan perparkiran di Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya seharusnya memberikan sanksi tegas bagi para juru parkir yang melakukan tindakan tidak resmi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, sehingga akan timbul efek jera bagi para

pelanggar serta lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap juru parkir.

2. Harus ada tindakan tegas untuk juru parkir tidak resmi dari pihak terkait, terkhusus untuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangani juru parkir tidak resmi.
4. Pihak Perusahaan Daerah Parkir harusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perbedaan juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi, agar masyarakat bisa membedakan juru parkir yang resmi dan tidak resmi.
5. Harus ada ancaman yang jelas dari perusahaan daerah parkir untuk setiap juru parkir yang telah melanggar aturan.
6. Peta dan nama-nama pengawas dalam setiap wilayah perparkiran harus jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KuHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur Dkk. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muladi Dkk. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Robinson Tarigan. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT bumi aksara.
- Romli. Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika aditama.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumidjo. 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV.Armic.
- Topo Santoso, dkk. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Internet

[Http://id.wikipedia.org/wiki/parkir](http://id.wikipedia.org/wiki/parkir) diakses pada tanggal 10 november 2014. pukul 09:37 WITA

Kamus besar bahasa Indonesia. diakses pada tanggal 16 noveember 2014. pukul 12:07 WITA

Kompasiana.com/post/read/52889/2/tata-kelola-parkir-kota-makassar-perlu-di-benahi.html. diakses pada tanggal 20 november 2014. pukul 22:06 WITA

repository.unhas.ac.id. diakses pada tanggal 18 november 2014. pukul 19:01 WITA

www.kemacetan.kotaMakassar.blogspot.com/2012/01/kemacetan-di-kota-makassar.htm. diakses pada tanggal 25 november 2014. pukul 19.00 WITA.

SKRIPSI

Dian Eko Prakoso. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum). 2013. hal 38

Fadli Sandi. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Izin Mengemudi Dikota Makassar: 2012. hal 15